

BAB II

GAMBARAN UMUM PDI PERJUANGAN KOTA SEMARANG

2.1 Profil PDI Perjuangan

2.1.1 Sejarah PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merupakan salah satu partai politik yang memiliki akar historis panjang dalam perkembangan kepartaian di Indonesia. Secara historis, akar PDI Perjuangan dapat ditelusuri hingga keberadaan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada 4 Juli 1927. PNI pada masa pergerakan nasional dibentuk sebagai organisasi politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan landasan nasionalisme dan penolakan terhadap kolonialisme. Dalam perkembangannya, gagasan politik yang dibangun Soekarno melalui PNI menjadi salah satu fondasi historis yang kemudian memberikan pengaruh terhadap perkembangan tradisi politik yang diidentifikasi dengan PDI Perjuangan. Dengan demikian, sejarah PDI Perjuangan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan nasionalisme Indonesia dan gagasan politik Soekarno yang menempatkan kemerdekaan, kedaulatan rakyat, dan perjuangan terhadap kolonialisme sebagai bagian penting dari orientasi politiknya (Sulistiyawan & Galih, 2022)

Dalam perkembangan berikutnya, identitas politik PDI tidak terlepas dari warisan pemikiran Soekarno. PDI Perjuangan menempatkan Pancasila 1 Juni 1945 dan Marhaenisme sebagai bagian penting dari identitas ideologisnya. Marhaenisme merupakan gagasan politik Soekarno yang menempatkan keberpihakan kepada rakyat kecil sebagai salah satu orientasi utama perjuangan politik. Gagasan tersebut

berkembang sebagai kritik terhadap berbagai bentuk eksploitasi yang lahir dari kapitalisme dan imperialisme serta menekankan pentingnya kemandirian dan pembebasan rakyat dari kondisi yang menempatkan mereka sebagai pihak yang dirugikan. Dalam perkembangannya, Marhaenisme dikaitkan dengan gagasan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang menjadi bagian dari pemikiran politik Soekarno. Identitas ideologis tersebut kemudian menjadi salah satu unsur yang membedakan PDI Perjuangan dari sekadar organisasi elektoral, karena partai juga menempatkan pembinaan ideologi dan pemahaman terhadap nilai-nilai perjuangan sebagai bagian dari kehidupan internal organisasi (Anggadifa et al., 2020), (Kurniawati, 2025).

Perjalanan PDI pada masa Orde Baru juga ditandai oleh dinamika kepemimpinan dan konflik internal partai. Dinamika tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kepentingan antarkelompok di dalam organisasi, tetapi juga berlangsung dalam konteks sistem politik Orde Baru yang memberikan ruang terbatas bagi kompetisi politik. Dalam perkembangan tersebut, Megawati Soekarnoputri memperoleh dukungan dari berbagai kelompok di dalam PDI dan kemudian dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI dalam Musyawarah Nasional yang berlangsung pada 22–23 Desember 1993 di Jakarta. Kepemimpinan Megawati selanjutnya menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan organisasi PDI pada periode menjelang Reformasi. Posisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan kepemimpinan dan konsolidasi organisasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan historis PDI (Puspitalova, 2024)

Ketegangan politik dan konflik internal PDI kemudian mencapai titik penting pada peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Kudatuli atau Sabtu Kelabu. Peristiwa tersebut berkaitan dengan penyerangan terhadap kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang pada saat itu menjadi salah satu simbol konflik mengenai kepemimpinan PDI. Peristiwa tersebut tidak hanya memperlihatkan kuatnya intervensi politik terhadap kehidupan kepartaian pada masa Orde Baru, tetapi juga menjadi bagian penting dari perjalanan politik kelompok pendukung Megawati. Dalam perkembangan selanjutnya, peristiwa Kudatuli menjadi salah satu pengalaman historis yang melekat dalam identitas politik PDI Perjuangan dan sering diposisikan sebagai bagian dari perjalanan perjuangan partai menghadapi tekanan politik pada masa Orde Baru (Arif, 2016).

Perubahan sistem politik setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 membuka ruang bagi reorganisasi dan perkembangan baru dalam kehidupan kepartaian Indonesia. Dalam hal tersebut, Megawati Soekarnoputri mengubah nama Partai Demokrasi Indonesia menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 1 Februari 1999. Nama tersebut kemudian digunakan dalam menghadapi Pemilihan Umum 1999 dan secara resmi dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Perubahan nama tersebut menandai babak baru perjalanan organisasi sekaligus memperkuat identitas politik yang dibangun berdasarkan pengalaman historis PDI dan kepemimpinan Megawati. Sejak periode Reformasi, PDI Perjuangan kemudian berkembang sebagai salah satu kekuatan utama dalam sistem kepartaian Indonesia dan mengikuti berbagai pemilihan umum dalam konteks demokrasi elektoral yang lebih terbuka (Diahwahyuningtyas, 2024).

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa perkembangan PDI Perjuangan dibentuk oleh rangkaian pengalaman politik yang panjang, mulai dari akar nasionalisme PNI, pembentukan PDI melalui fusi partai pada 1973, dinamika internal dan kepemimpinan pada masa Orde Baru, konflik politik 1996, hingga perubahan menjadi PDI Perjuangan pada awal Reformasi. Rangkaian pengalaman tersebut turut membentuk identitas organisasi, orientasi ideologis, serta pola konsolidasi internal PDI Perjuangan. Aspek-aspek tersebut penting untuk dipahami karena kaderisasi sebagai proses internal partai tidak berdiri secara terpisah dari karakter organisasi dan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan partai. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sejarah PDI Perjuangan menjadi konteks awal untuk melihat struktur organisasi dan sistem kaderisasi yang dikembangkan partai, termasuk pelaksanaan kaderisasi di tingkat lokal seperti DPC PDI Perjuangan Kota Semarang (Diahwahyuningtyas, 2024; Anggadifa et al., 2020; Sulistiyawan & Galih, 2022).

2.1.2 Ideologi Marhaenisme sebagai Landasan PDI Perjuangan

PDI Perjuangan mendasarkan ideologi perjuangannya pada Marhaenisme, sebuah konsep yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno sebagai respons terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Istilah Marhaen berasal dari nama seorang petani di daerah Bandung Selatan yaitu Kiduleuen dan Cigelereng, yang ditemui oleh Soekarno pada tahun 1926-1927. Petani tersebut memiliki tanah, cangkul, dan alat produksi sendiri, namun tetap hidup dalam kemiskinan karena hasil panennya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara sederhana, tanpa kelebihan untuk kemakmuran (Parandaru, 2023).

Dari pertemuan tersebut, Soekarno kemudian merumuskan Marhaenisme sebagai landasan ideologis perjuangan politik yang berorientasi pada pembebasan rakyat kecil dari penindasan struktural. Marhaen dipahami bukan sekadar individu petani yang ditemuinya, melainkan simbol kondisi mayoritas rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan meskipun memiliki atau menguasai alat produksi sederhana. Dalam kerangka ini, Marhaenisme menjadi kritik terhadap kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme yang menciptakan ketimpangan sosial, sekaligus merupakan penyesuaian pemikiran sosialisme dengan realitas masyarakat Indonesia yang bersifat agraris dan belum terindustrialisasi. Berbeda dengan Marxisme klasik yang bertumpu pada kelas buruh industri, Marhaenisme menempatkan petani kecil, nelayan, pedagang kecil, dan kelompok marginal lainnya sebagai subjek utama perjuangan politik dan sosial (Pratama et al., 2022).

Konsep awal Marhaenisme tertuang dalam tulisan-tulisan Soekarno di majalah Fikiran Ra'jat pada tahun 1933, seperti "Maklumat dari Bung Karno kepada Marhaen Indonesia", "Marhaen dan Proletar", "Marhaen dan Marhaeni", serta "Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi". Tulisan-tulisan tersebut kemudian dikompilasi dalam buku klasik Di Bawah Bendera Revolusi (1959/versi terbit ulang), yang memuat 61 tulisan Soekarno dari tahun 1926 hingga 1941 (Parandaru, 2023)

Menurut Soekarno, Marhaenisme terdiri dari dua pilar utama, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme menekankan semangat kebangsaan yang tetap menghargai kemanusiaan universal, menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan, namun juga menghindari sikap *chauvinisme* atau

superioritas atas bangsa lain. Sementara itu, sosio-demokrasi mengacu pada demokrasi yang tidak hanya berlaku di ranah politik, tetapi juga di ranah ekonomi dan sosial artinya, rakyat kecil harus memiliki kedaulatan atas alat-alat produksi, distribusi, dan sumber daya agar tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan ekonomi bangsa (Cahyaningtyas, 2020; Pratama et al., 2022).

Marhaenisme menolak sistem kapitalis yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta menolak liberalisme dan individualisme yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif. Sebagai ideologi perjuangan, Marhaenisme menjadi landasan bagi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno pada 1927, dan kemudian diteruskan oleh PDI Perjuangan sebagai pewaris semangat Soekarno. Dalam PDI Perjuangan, Marhaenisme diterjemahkan sebagai komitmen untuk membela kepentingan wong cilik atau rakyat kecil, yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan orientasi politik partai (Parandaru, 2023)

Pada implementasi Marhaenisme, praktik politik PDI Perjuangan tidak terlepas dari kritik, terutama terkait dengan pragmatisme politik yang dinilai kadang menjauh dari spirit perjuangan rakyat kecil yang menjadi inti dari Marhaenisme (Erlangga, 2024). Meskipun demikian, PDI Perjuangan terus menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai Marhaenisme kepada seluruh kadernya melalui berbagai program pendidikan politik dan kaderisasi. Ajaran-ajaran Bung Karno, termasuk konsep Marhaenisme, menjadi materi wajib dalam setiap program kaderisasi dan pendidikan politik di PDI Perjuangan, termasuk di Sekolah Partai

yang diselenggarakan oleh DPP maupun DPC di berbagai daerah (PDI Perjuangan Jatim, 2023)

Dengan demikian, Marhaenisme bukan hanya sekadar retorika politik, melainkan menjadi bagian integral dari identitas ideologis yang membedakan PDI Perjuangan dari partai politik lainnya di Indonesia, sekaligus sebagai panduan perjuangan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan berdaulat sesuai cita-cita Soekarno (Cahyaningtyas, 2020; Parandaru, 2023).

2.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Partai

PDI Perjuangan memiliki struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis dan berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat ranting di desa/kelurahan. Struktur ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang efektif antara kebijakan nasional partai dengan implementasinya di tingkat lokal, sekaligus menjaga kedisiplinan organisasi dan loyalitas kader terhadap garis perjuangan partai, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2019)

Struktur organisasi PDI Perjuangan terdiri dari beberapa tingkatan utama:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan merupakan organ tertinggi partai yang berkedudukan di Jakarta dan dipimpin oleh Ketua Umum. DPP memiliki kewenangan tertinggi dalam merumuskan kebijakan strategis partai, menentukan garis politik, serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan partai di tingkat nasional. Ketua Umum PDI Perjuangan saat ini adalah Megawati Soekarnoputri, yang telah memimpin partai sejak tahun 1998 hingga sekarang (termasuk periode 2025-2030 hasil Kongres VI PDI Perjuangan di Bali pada

Agustus 2025) (JPNN.com, 2024). DPP juga membawahi berbagai bidang kerja dan departemen yang menangani urusan organisasi, ideologi, kaderisasi, keanggotaan, urusan perempuan, pemuda, dan berbagai bidang lainnya, seperti Bidang Ideologi dan Kaderisasi serta Bidang Kehormatan Partai (Derap Juang, 2025).

2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan berada di tingkat provinsi dan berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan partai di wilayah provinsi. DPD memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan DPC-DPC yang berada di kabupaten/kota dalam wilayah provinsinya, serta melakukan pembinaan terhadap kader di tingkat provinsi (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2019).
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan berada di tingkat kabupaten/kota dan merupakan struktur yang sangat strategis dalam implementasi kebijakan partai di tingkat lokal. DPC bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program partai di wilayahnya, termasuk rekrutmen kader, penyelenggaraan pendidikan politik, pengusulan calon legislatif untuk DPRD kabupaten/kota, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. DPC Kota Semarang merupakan salah satu DPC terbesar dan terkuat di Jawa Tengah, yang secara konsisten berhasil menjadi partai dominan di DPRD Kota Semarang (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2019).
4. Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan berada di tingkat kecamatan dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan DPC dalam menjalankan tugas-tugas organisasi di tingkat yang lebih rendah. PAC berperan penting dalam mobilisasi

massa dan penguatan basis partai di tingkat kecamatan, serta sering menjadi tahap awal konsolidasi menuju Musyawarah Anak Cabang (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2019).

5. Pengurus Ranting PDI Perjuangan berada di tingkat desa/kelurahan dan merupakan ujung tombak partai dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat akar rumput. Pengurus ranting memiliki peran vital dalam menjaga hubungan dengan konstituen, melakukan sosialisasi program partai, dan memobilisasi dukungan pada saat pemilihan umum, serta menjadi basis utama dalam konsolidasi struktur hingga anak ranting (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2019).
6. Selain struktur vertikal tersebut, PDI Perjuangan juga memiliki organisasi sayap atau *onderbouw* yang berfungsi sebagai wadah pembinaan kader dari berbagai segmen masyarakat. Beberapa *onderbouw* yang penting di PDI Perjuangan antara lain adalah Banteng Muda Indonesia (BMI) untuk segmen pemuda (dibentuk pada 29 Maret 2000 di Semarang sebagai organisasi sayap utama pemuda), serta organisasi sayap lainnya yang membidangi perempuan, petani, nelayan, buruh, dan profesional. Organisasi sayap ini berperan penting dalam proses kaderisasi, karena menjadi ajang pelatihan awal bagi calon kader partai sebelum mereka masuk ke dalam struktur formal partai (Mahendra, 2024).

Dalam kaderisasi, struktur organisasi PDI Perjuangan memberikan jalur yang jelas bagi kader untuk mengembangkan kapasitas dan karier politik mereka. Seorang kader yang berprestasi di tingkat ranting dapat naik ke PAC, kemudian ke DPC, DPD, hingga DPP. Proses ini tidak hanya bergantung pada masa

keanggotaan, tetapi juga pada loyalitas, kapasitas, dan kontribusi kader terhadap partai, dengan penekanan pada pendidikan politik melalui Sekolah Partai sebagai bagian integral dari sistem kaderisasi (Hasibuan & Ma'riyah, 2022). Dalam hal pencalonan legislatif, DPC memiliki peran sentral karena merupakan lembaga yang berwenang mengusulkan nama-nama calon legislatif untuk DPRD kabupaten/kota kepada DPP atau DPD, yang kemudian akan melalui proses verifikasi dan penetapan final (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2019).

Struktur organisasi dan tata kelola partai ini mencerminkan orientasi PDI Perjuangan sebagai partai pelopor dengan tradisi kaderisasi yang menekankan kedisiplinan ideologi, loyalitas kader, dan kerja politik di akar rumput, sebagaimana dibangun melalui pendidikan politik dan Sekolah Partai serta arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada kadernya (Ramadhani et al., 2025).

2.2 Profil DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Semarang merupakan struktur kepengurusan PDI Perjuangan pada tingkat kabupaten/kota yang menjalankan fungsi organisasi, konsolidasi kader, pengoordinasian struktur kepartaian di tingkat bawah, serta pelaksanaan berbagai agenda politik dan kerakyatan di wilayah Kota Semarang. Dalam struktur kepartaian, DPC menjadi penghubung antara kepengurusan di tingkat provinsi dengan Pengurus Anak Cabang (PAC) pada tingkat kecamatan serta struktur kepartaian di bawahnya. Kantor sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Semarang tercatat beralamat di Jalan Untung Suropati Nomor 12, Kota Semarang (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2026)

Posisi DPC sebagai organisasi tingkat kota menjadikan struktur ini penting dalam penelitian mengenai pengembangan kapasitas kader perempuan. Aktivitas kaderisasi, konsolidasi organisasi, penataan struktur, keterlibatan kader dalam kegiatan politik, hingga proses penugasan politik berlangsung dalam jaringan organisasi yang menghubungkan tingkat DPC, PAC, ranting, dan struktur kepartaian lainnya. Profil organisasi berikut memberikan gambaran mengenai perkembangan, struktur, keanggotaan, serta kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.

2.2.1 Sejarah Singkat DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

DPC PDI Perjuangan Kota Semarang merupakan bagian dari struktur PDI Perjuangan yang berkembang seiring dengan perjalanan organisasi PDI Perjuangan di tingkat nasional dan daerah. Secara historis, akar politik PDI Perjuangan berkaitan dengan dinamika Partai Demokrasi Indonesia (PDI), termasuk peristiwa politik pada masa sebelum Reformasi yang kemudian menjadi bagian penting dari identitas historis PDI Perjuangan. Pada tingkat Jawa Tengah, sejarah perjuangan tersebut terus dipelihara sebagai bagian dari identitas dan memori kolektif organisasi (Aim, 2025)

Dokumentasi resmi struktur DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Semarang telah memiliki struktur kepengurusan formal setidaknya sejak periode 2015–2020. Pada masa tersebut, kepengurusan DPC Kota Semarang dipimpin oleh Hendrar Prihadi sebagai ketua, dengan susunan kepengurusan yang mencakup berbagai bidang organisasi, termasuk kaderisasi dan ideologi, pemenangan pemilu, organisasi, ekonomi, serta

bidang perempuan dan anak. Keberadaan bidang perempuan dan anak pada struktur tersebut menunjukkan bahwa isu perempuan telah memperoleh ruang formal dalam pembagian fungsi organisasi (DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, 2020).

Perkembangan organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Semarang juga tidak dapat dipisahkan dari perubahan struktur kepengurusan pada setiap periode. Dalam perjalanan penelitian ini, perubahan kepengurusan menjadi penting karena struktur organisasi menentukan pembagian bidang, ruang keterlibatan kader, serta aktor yang menjalankan fungsi kaderisasi dan pengembangan sumber daya organisasi (DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, 2020).

Pada periode kepengurusan terkini, struktur DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengalami penataan kembali. Berdasarkan data resmi KPU, kepengurusan tingkat Kota Semarang ditetapkan melalui keputusan kepengurusan tahun 2026. Informasi pada laman resmi DPC juga mencantumkan susunan organisasi untuk periode 2025–2030. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi terus mengalami pembaruan sebagai bagian dari dinamika kepartaian dan konsolidasi organisasi (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2026).

Bagi penelitian ini, keberadaan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang pada tahun 2025-2026 menjadi penting karena penelitian berfokus pada kondisi dan praktik pengembangan kapasitas kader perempuan dalam struktur organisasi yang berlaku pada tahun tersebut. Oleh sebab itu, pengembangan kapasitas kader perempuan dianalisis berdasarkan ruang organisasi, kebijakan, program, serta praktik yang berlangsung di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang pada tahun 2026.

2.2.2 Struktur Kepengurusan DPC

Struktur kepengurusan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan fungsi organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Melalui struktur tersebut, pembagian tugas dan tanggung jawab organisasi dilakukan berdasarkan jabatan serta bidang-bidang yang menangani fungsi tertentu. Struktur kepengurusan juga menjadi ruang formal bagi kader untuk terlibat dalam aktivitas organisasi dan memperoleh pengalaman dalam menjalankan tugas kepartaian.

Berdasarkan dokumen **Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2025**, kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang terdiri atas unsur pimpinan serta bidang-bidang yang menjalankan fungsi internal dan kerakyatan. Susunan kepengurusan tersebut meliputi ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, bidang internal, serta bidang kerakyatan. Secara lebih rinci, struktur dan komposisi kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 1Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kota Semarang
Tahun 2025

No.	Jabatan	Nama dan Gelar
1	Ketua	H. Endro Dwi Cahyo, S.T.
2	Sekretaris	Sutiyono, S.H.
3	Wakil Sekretaris Bidang Internal	Nungki Sundari, S.E.
4	Wakil Sekretaris Bidang Program	Andrey Rejesdy Wijaya, S.T.

No.	Jabatan	Nama dan Gelar
5	Wakil Bendahara	Trirena Weyatin Soehendri, S.Kom.
6	Wakil Bendahara	Dyah Ratna Harimurti, S.Sos., M.A.P.
	Bidang Internal	
7	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai, Ideologi, dan Kaderisasi	Anggoro Mardi Husodo (Yoyok Mardi Jo)
8	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif	Joko Susilo, S.M.
9	Wakil Ketua Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Sumber Daya	Agus Widiyanto, S.E.
	Bidang Kerakyatan	
10	Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kebijakan Publik	Kadarsuman, S.E., M.M.
11	Wakil Ketua Bidang Reformasi Birokrasi dan Reformasi Sistem Politik Nasional	Didik Sugeng
12	Wakil Ketua Bidang Perekonomian, Kebudayaan, dan Pendidikan	Lely Purwandari
13	Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak	Novi Sukmawati Ayuningrum, S.E.
14	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana	Lucas Oscara Trisnanda
15	Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, dan UMKM	Endang Rewati, S.E.
16	Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi	H.M. Rukiyanto Arif Budiman, S.H., M.A.

No.	Jabatan	Nama dan Gelar
17	Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Abang Makno
18	Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Oldy Ardhana
19	Wakil Ketua Bidang Pertanian, Pangan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan	Wisda Pridatoe
20	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital	Michael, S.Kom.
21	Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial	Yusi Utari Ekawati

Sumber: Dokumen Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang PDI

Perjuangan Kota Semarang Tahun 2025.

Berdasarkan struktur tersebut, keterlibatan perempuan di dalam kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang tidak hanya terlihat melalui pemenuhan jumlah keterwakilan, tetapi juga melalui penempatan perempuan pada sejumlah posisi dalam struktur organisasi. Kader perempuan menduduki jabatan pada unsur sekretariat, bendahara, serta beberapa bidang kerakyatan. Salah satu bidang yang secara langsung berkaitan dengan isu perempuan berada pada Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak.

Susunan tersebut menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki ruang formal dalam struktur kepengurusan DPC. Posisi struktural tersebut berpotensi menjadi salah satu ruang bagi kader perempuan untuk memperoleh pengalaman organisasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, menjalankan penugasan

kepartaian, serta membangun kapasitas politik dan organisasional. Keberadaan struktur formal tersebut selanjutnya menjadi penting untuk dianalisis dalam penelitian ini, terutama untuk melihat sejauh mana keterlibatan perempuan dalam struktur organisasi benar-benar memberikan ruang bagi proses pengembangan kapasitas kader perempuan.

2.2.3 Jumlah Kader dan Keanggotaan

Data mengenai jumlah anggota PDI Perjuangan di Kota Semarang dapat ditelusuri melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan KPU. Berdasarkan data pemutakhiran keanggotaan yang tersedia pada Portal KPU untuk Kota Semarang, jumlah anggota PDI Perjuangan tercatat sebanyak **2.404 orang** yang tersebar di 16 kecamatan (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2026).

Persebaran keanggotaan tersebut menunjukkan variasi jumlah anggota antar kecamatan. Data KPU mencatat jumlah anggota terbesar berada di Kecamatan Genuk, yaitu sebanyak **1.081 anggota**, diikuti Kecamatan Pedurungan sebanyak **279 anggota** dan Kecamatan Tembalang sebanyak **232 anggota**. Keanggotaan juga tersebar di kecamatan lain seperti Ngaliyan, Gajahmungkur, Mijen, Banyumanik, dan wilayah lainnya di Kota Semarang (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2026).

Data keanggotaan ini perlu dibedakan dari jumlah pengurus struktural. Laman resmi DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menampilkan angka **143 anggota** dalam profil organisasi, sedangkan data KPU mencatat jumlah keanggotaan yang lebih besar. Perbedaan tersebut kemungkinan berkaitan dengan perbedaan basis pencatatan antara data yang ditampilkan pada profil internal

organisasi dan data keanggotaan partai yang tercatat dalam sistem pemutakhiran KPU. Karena penelitian ini memerlukan ketelitian sumber, angka **2.404 anggota** digunakan sebagai data keanggotaan yang bersumber dari Portal KPU, sementara angka pada laman DPC dapat dipahami sebagai informasi yang ditampilkan dalam profil internal organisasi dan tidak secara eksplisit menjelaskan kategori anggotanya (DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, 2026)

Keanggotaan yang tersebar di seluruh kecamatan menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Semarang memiliki basis organisasi yang tidak hanya berada pada tingkat kepengurusan kota. Kader dapat terlibat melalui berbagai tingkat organisasi, termasuk PAC dan struktur kepartaian yang berada lebih dekat dengan masyarakat. Bagi kader perempuan, keberadaan jaringan organisasi tersebut menjadi salah satu ruang untuk memperoleh pengalaman politik, membangun jejaring sosial, mengikuti aktivitas organisasi, serta memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam penugasan kepartaian.

Selain jumlah keanggotaan, kekuatan elektoral PDI Perjuangan di Kota Semarang juga dapat dilihat melalui hasil Pemilu 2024. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Semarang mengenai penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2024, PDI Perjuangan memperoleh **264.550 suara sah partai dan calon secara keseluruhan** dari enam daerah pemilihan di Kota Semarang (Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, 2024).

Data tersebut memberikan gambaran bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Semarang bekerja dalam organisasi dengan basis keanggotaan dan aktivitas politik yang luas. Kondisi ini relevan untuk memahami proses pengembangan kapasitas

kader perempuan karena pengalaman kader tidak hanya dibentuk melalui pendidikan formal, melainkan juga melalui keterlibatan dalam jaringan organisasi dan aktivitas politik yang tersebar pada berbagai tingkat struktur.

2.2.4 Program dan Kegiatan Organisasi

Program dan kegiatan organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Semarang berkaitan dengan fungsi utama organisasi partai, terutama konsolidasi internal, penataan struktur, kaderisasi, pemenangan politik, serta keterlibatan kader dalam kegiatan kerakyatan. Laman resmi DPC PDI Perjuangan Kota Semarang secara umum menjelaskan bahwa DPC menjalankan fungsi kegiatan politik, konsolidasi kader, dan pengoordinasian struktur partai pada tingkat bawah (DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, 2026)

Salah satu kegiatan organisasi yang menonjol pada periode penelitian adalah **konsolidasi dan penataan struktur kepartaian**. Pada tahun 2026, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menjalankan rangkaian reorganisasi hingga tingkat PAC melalui Musyawarah Anak Cabang. DPC dan sekretariat DPC di seluruh Jawa Tengah dilibatkan dalam persiapan dan pelaksanaan agenda tersebut. Proses ini mencakup penyaringan dan penjaringan calon pengurus PAC, pengaturan administrasi organisasi, serta pembentukan struktur kepengurusan tingkat kecamatan (Aim, 2026c).

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi organisasi tidak hanya berorientasi pada pergantian kepengurusan, tetapi juga pada penataan sumber daya organisasi hingga tingkat akar rumput. Pada agenda konsolidasi tahun 2026, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menyatakan bahwa penataan struktur diarahkan

untuk membangun kekuatan internal partai dan mempersiapkan sumber daya organisasi dalam menghadapi agenda politik (Aim, 2026c).

Aspek lain yang relevan adalah **kaderisasi dan pengembangan anggota melalui organisasi sayap dan jaringan kader muda**. Pada tahun 2024, kegiatan kaderisasi anggota Taruna Merah Putih (TMP) Jawa Tengah diselenggarakan di Kota Semarang sebagai bagian dari pengembangan kader muda. Kegiatan tersebut diarahkan kepada kelompok generasi muda yang memasuki usia produktif dan menjadi salah satu wadah pembelajaran politik bagi kader muda (Aim, 2024)

Pada perkembangan yang lebih baru, organisasi PDI Perjuangan Jawa Tengah juga menyelenggarakan kegiatan yang secara khusus berkaitan dengan penguatan perempuan. Salah satunya adalah *Training of Trainer Perempuan Penggerak Akar Rumput (PPAR)* pada Agustus 2026 yang diikuti perwakilan perempuan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya program pengembangan yang secara eksplisit diarahkan kepada kader atau penggerak perempuan, meskipun penyelenggaraannya berada pada tingkat DPD Jawa Tengah dan tidak dapat secara langsung disamakan dengan program yang dirancang serta dilaksanakan secara mandiri oleh DPC Kota Semarang (Aim, 2026b).

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai kegiatan organisasi yang dilaksanakan dalam lingkungan PDI Perjuangan, aktivitas yang berkaitan dengan penguatan organisasi dan pengembangan kader dapat dikelompokkan secara analitis ke dalam beberapa bentuk. Pengelompokan ini tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi resmi partai, melainkan sebagai cara untuk memetakan ragam aktivitas

organisasi yang menjadi lingkungan bagi proses pengembangan kapasitas kader perempuan. Bentuk kegiatan tersebut meliputi: **Konsolidasi dan penataan struktur organisasi**, mulai dari tingkat DPC hingga PAC dan struktur di bawahnya;

1. Konsolidasi dan penataan struktur organisasi, mulai dari tingkat DPC hingga PAC dan struktur organisasi di bawahnya. Kegiatan ini terlihat melalui agenda konsolidasi, Musancab, Musran, Musanran, serta penataan dan pemutakhiran struktur organisasi (Aim, 2026c)
2. Kaderisasi dan pengembangan anggota, yang mencakup berbagai upaya penguatan kapasitas dan kompeten organisasionalnya kegiatan pembinaan, pelatihan, maupun pengembangan organisasi (Aim, 2026a).
3. Pendidikan dan pembinaan politik, terutama kegiatan yang diarahkan pada penguatan pemahaman politik, kemampuan kader menjadi penggerak organisasi, serta peningkatan kapasitas kader dalam menjalankan perannya di masyarakat (Aim, 2026d)
4. Persiapan dan penguatan organisasi dalam menghadapi agenda elektoral, termasuk konsolidasi kader dan struktur sebagai bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang (Aim, 2026b).
5. Kegiatan kerakyatan dan keterlibatan sosial, yaitu aktivitas yang mempertemukan kader dengan masyarakat serta memperkuat kehadiran organisasi di tingkat akar rumput (Aim, 2026d).
6. Program penguatan kelompok tertentu, termasuk kegiatan yang secara khusus diarahkan pada kader perempuan untuk meningkatkan kemampuan

sebagai penggerak organisasi dan fasilitator pendidikan politik (Aim, 2026d).

Ragam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas kader perempuan berlangsung dalam lingkungan organisasi yang menyediakan berbagai ruang pembelajaran, keterlibatan, dan pengalaman organisasi. Penelitian ini tidak menganggap seluruh kegiatan tersebut sebagai program yang secara khusus dirancang untuk mengembangkan kader perempuan. Perbedaan ini penting karena penelitian berfokus pada bagaimana kegiatan, struktur, dan ruang organisasi yang tersedia tersebut benar-benar memberikan kesempatan bagi kader perempuan untuk mengembangkan kapasitas politik dan organisasionalnya.

2.3 Sistem Kaderisasi PDI Perjuangan

Kaderisasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun keberlanjutan organisasi PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memiliki basis ideologis kuat. Sistem kaderisasi PDI Perjuangan dirancang untuk mengembangkan kapasitas kader agar tidak hanya memiliki kompetensi teknis dalam bidang politik dan pemerintahan, tetapi juga memiliki kesadaran ideologis yang kuat berdasarkan Pancasila dan ajaran Marhaenisme. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekolah Partai adalah bagian dari sistem pembinaan yang dibangun oleh partai demi menghasilkan calon pemimpin yang berproses dari bawah dan mengabdikan pada bangsa dan negara Indonesia (Bungalan, 2021; Hakim, 2021).

Sistem kaderisasi PDI Perjuangan dirancang secara berjenjang dan sistemik melalui pendidikan formal dan informal di berbagai tingkat struktur partai, dengan

Sekolah Partai dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) memainkan peran penting dalam membentuk kapasitas serta pemahaman ideologis kader sebelum mereka memegang posisi strategis dalam organisasi atau pemerintahan (Daffa, 2023). Proses kaderisasi ini mencakup beberapa komponen utama

1.3.1 Jenjang Kaderisasi

Kaderisasi di PDI Perjuangan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Jenjang kaderisasi ini meliputi:

1. Pendidikan Kader Pratama, yang merupakan pendidikan dasar bagi anggota baru partai. Dalam pendidikan ini, peserta dikenalkan dengan sejarah partai, ideologi Marhaenisme, struktur organisasi, serta hak dan kewajiban sebagai kader. Pendidikan kader Pratama biasanya diselenggarakan oleh DPC atau PAC dan menjadi syarat minimal bagi seseorang untuk dianggap sebagai kader partai (Haris et al., 2016).
2. Pendidikan Kader Madya, yang ditujukan bagi kader yang telah memiliki pengalaman organisasi dan dianggap memiliki potensi untuk menduduki posisi struktural dalam partai. Materi yang diberikan lebih mendalam, mencakup strategi politik, manajemen organisasi, komunikasi politik, serta pemahaman tentang kebijakan publik (Haris et al., 2016).
3. Pendidikan Kader Utama, yang merupakan jenjang tertinggi dalam sistem kaderisasi dan ditujukan bagi kader-kader senior yang diproyeksikan untuk menjadi pemimpin partai atau calon kepala daerah. Pendidikan ini mencakup materi tentang kepemimpinan nasional, geopolitik, dan strategi pembangunan nasional (Haris et al., 2016).

Selain jenjang pendidikan kader tersebut, PDI Perjuangan juga menyelenggarakan berbagai program pembinaan khusus, seperti Pendidikan Kader Perempuan Tingkat Nasional (PKPN) yang secara khusus dirancang untuk mengembangkan kapasitas kader perempuan. Program ini mencakup materi tentang ideologi, aspek kerakyatan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, hingga pergerakan ekonomi rakyat. Program pembinaan perempuan yang diselenggarakan secara berkala menjadi salah satu upaya partai untuk memperkuat kapasitas kader perempuan di berbagai aspek kehidupan organisasi dan masyarakat, dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sering membuka dan memberikan arahan langsung (Muliawati, 2023; Rosyidi, 2023).

1.3.2 Sekolah Partai sebagai Pusat Kaderisasi

Sekolah Partai merupakan salah satu instrumen pendidikan politik dan kaderisasi yang dikembangkan PDI Perjuangan sebagai bagian dari proses penyiapan kader dan calon pemimpin partai. Keberadaan Sekolah Partai bukan hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan, tetapi merupakan bagian dari sistem kaderisasi yang diarahkan untuk menghasilkan calon pemimpin yang berproses dari bawah, memiliki pemahaman terhadap ideologi partai, serta memiliki orientasi pengabdian kepada masyarakat. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, penyelenggaraan Sekolah Partai telah dilakukan sejak tahun 2015 dan mencakup berbagai bentuk pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan kaderisasi, antara lain sekolah bagi calon kepala daerah, calon anggota legislatif, calon pimpinan partai, sekretaris partai, dan bendahara partai (Goekpri, 2020)

Secara kelembagaan, Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai didirikan pada tingkat pusat dan dikelola langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan 2019, Sekolah Partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditujukan kepada anggota partai, kader partai, calon anggota DPR, DPD dan DPRD, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peserta Sekolah Partai tidak terbatas pada kader yang sedang menjalani pendidikan kaderisasi berjenjang, tetapi juga mencakup kader dan anggota yang dipersiapkan untuk menjalankan fungsi representasi maupun jabatan politik dan publik (PDI Perjuangan, 2019).

Dalam sistem kaderisasi PDI Perjuangan, Sekolah Partai juga perlu dibedakan dari pendidikan kader yang dilaksanakan secara berjenjang. AD/ART PDI Perjuangan mengatur bahwa kaderisasi partai terdiri atas Kaderisasi Tingkat Pratama, Madya, dan Utama. Pendidikan Kader Pratama dilaksanakan oleh DPC, pendidikan Kader Madya dilaksanakan oleh DPD, sedangkan pendidikan Kader Utama dilaksanakan oleh DPP. Dengan demikian, Sekolah Partai berada dalam lingkup pendidikan politik dan pengembangan kapasitas kader yang dikelola pada tingkat pusat, sementara pendidikan kader berjenjang memiliki pembagian kewenangan berdasarkan tingkat organisasi partai (PDI Perjuangan, 2019).

Pada tahun 2021, PDI Perjuangan mengalihfungsikan kantor partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, menjadi gedung Sekolah Partai yang dirancang khusus untuk penyelenggaraan program-program kaderisasi partai. Sekolah Partai ini

dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, termasuk aula besar, tiga ruang kelas pendukung, tempat tidur dengan kapasitas 200 orang, ruang makan dan ruang medis, kantin Mustika Rasa, serta ruang khusus bernama Soekarno Corner yang berfungsi sebagai perpustakaan yang menggambarkan keseluruhan sejarah perjuangan Bung Karno (Bungalan, 2021).

Kurikulum Sekolah Partai diarahkan untuk membangun kapasitas kader tidak hanya dalam aspek pengetahuan politik, tetapi juga dalam aspek ideologi, organisasi, kepemimpinan, dan kedisiplinan. Dalam penyelenggaraannya, peserta diberikan pemahaman mengenai Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, ideologi partai, geopolitik, serta kepemimpinan Indonesia dalam hubungan internasional. Sekolah Partai juga menekankan disiplin ideologi, disiplin teori, disiplin organisasi, serta orientasi kerakyatan. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis politik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan orientasi politik kader agar memahami politik sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat (Bungalan, 2021).

Pelaksanaan Sekolah Partai dilakukan dalam berbagai bentuk dan tidak menunjukkan satu pola frekuensi yang seragam untuk seluruh peserta. Intensitas dan durasi kegiatan disesuaikan dengan jenis pendidikan serta kelompok kader yang menjadi sasaran. Sebagai contoh, Sekolah Partai bagi calon kepala daerah pada Pilkada 2020 diselenggarakan dalam beberapa gelombang. Pada gelombang kedua, sebanyak 94 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah mengikuti pendidikan selama lima hari penuh, dengan kegiatan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Sebelumnya, penyelenggaraan untuk calon kepala daerah bahkan

berlangsung selama tujuh hari sebelum durasinya dipadatkan menjadi lima hari karena kondisi pandemi COVID-19 (Goekpri, 2020)

Pola penyelenggaraan yang berbeda juga terlihat pada pendidikan bagi kader muda. Pada tahun 2023, DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan pembekalan bagi 94 kader muda dari berbagai daerah di Gedung Sekolah Partai Lenteng Agung selama tiga hari. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berada pada rentang usia 22–44 tahun. Kegiatan berlangsung secara intensif dengan pembelajaran di kelas, pemberian tugas, serta aktivitas pembinaan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Partai dapat diselenggarakan secara periodik sesuai dengan kebutuhan kaderisasi dan kelompok sasaran, sehingga tidak tepat apabila Sekolah Partai dipahami sebagai program pelatihan yang hanya dilaksanakan satu kali atau memiliki jadwal tahunan yang bersifat tetap (PDI Perjuangan Lampung, 2023).

Sekolah Partai juga digunakan untuk mengembangkan kapasitas kader perempuan. Pada tahun 2023, DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan pendidikan kaderisasi nasional untuk kepemimpinan perempuan yang dilaksanakan secara *hybrid* dengan pusat kegiatan di Sekolah Partai. Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 peserta secara luring dan 2.603 peserta secara daring. Penyelenggaraan khusus bagi kader perempuan menunjukkan bahwa Sekolah Partai tidak hanya menjadi instrumen pendidikan politik yang bersifat umum, tetapi juga dapat digunakan untuk memberikan pembinaan yang diarahkan pada kelompok kader tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi dan agenda kaderisasi partai (Fauzi, 2023).

Dengan demikian, Sekolah Partai dapat dipahami sebagai salah satu infrastruktur pengembangan kapasitas sumber daya manusia politik PDI Perjuangan yang

memiliki cakupan peserta dan bentuk kegiatan yang beragam. Sekolah Partai menyediakan ruang pendidikan politik, ideologi, organisasi, kepemimpinan, dan pembekalan bagi kader yang dipersiapkan untuk menjalankan berbagai peran politik. Bagi penelitian ini, keberadaan Sekolah Partai menjadi penting karena menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas kader perempuan tidak hanya berlangsung melalui kegiatan internal di tingkat DPC, tetapi juga terhubung dengan mekanisme pendidikan dan kaderisasi yang dikelola secara terpusat oleh DPP. Namun, akses dan keterlibatan kader perempuan dalam berbagai bentuk pendidikan tersebut perlu dilihat lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana infrastruktur kaderisasi tersebut memberikan kesempatan yang setara dalam pengembangan kapasitas kader perempuan.

2.3.3 Peran Organisasi Sayap dalam Kaderisasi

Organisasi sayap atau *onderbouw* memainkan peran yang sangat penting dalam proses kaderisasi, terutama bagi segmen-segmen khusus seperti perempuan, pemuda, petani, dan buruh. Dalam proses pembinaan kader, program seperti PKPN dan kegiatan di bawah Bidang Ideologi serta Kaderisasi DPP PDI Perjuangan berfungsi sebagai wadah pengembangan kapasitas utama. Melalui program ini, kader perempuan memperoleh ruang untuk memperkuat pemahaman ideologi, isu-isu gender, pemberdayaan, serta keterampilan organisasi dan politik (Rosyidi, 2023; Muliawati, 2023)

Sejumlah penelitian tentang kaderisasi politik menunjukkan bahwa organisasi sayap partai berfungsi sebagai instrumen perekrutan dan pembinaan kader, sekaligus sebagai ruang untuk memperluas jejaring sosial dan politik perempuan di

dalam partai. Melalui keterlibatan dalam organisasi sayap dan unit perempuan partai, kader perempuan memperoleh kesempatan untuk membangun kapasitas komunikasi politik, memperkuat hubungan internal partai, serta meningkatkan peluang untuk dicalonkan dalam jabatan legislatif maupun posisi strategis lainnya (Wijayanti & Iswandi, 2021; Laili et al., 2024).

Kaderisasi perempuan di PDI Perjuangan juga dilakukan melalui program-program khusus seperti Pendidikan Kader Perempuan Tingkat Nasional (PKPN) yang diselenggarakan secara berkala. Program ini tidak hanya fokus pada aspek teknis politik, tetapi juga pada pembentukan karakter kepemimpinan perempuan yang sesuai dengan nilai-nilai Marhaenisme. Dengan demikian, pembinaan kader perempuan di PDI Perjuangan diarahkan untuk menyiapkan kader yang memiliki kapasitas memadai dan komitmen terhadap nilai-nilai perjuangan partai, tidak hanya terbatas pada pemenuhan ketentuan keterwakilan secara formal (Muliawati, 2023; Rosyidi, 2023).

PDI Perjuangan memiliki sejumlah organisasi sayap *onderbouw* yang berperan strategis dalam memperluas basis massa partai dan melakukan kaderisasi di berbagai segmen masyarakat. Organisasi-organisasi sayap ini memiliki fungsi linkage yang menghubungkan partai dengan konstituen, menjalankan sosialisasi, komunikasi, dan rekrutmen kader sesuai dengan kebutuhan partai (Mahendra, 2024). Berikut adalah organisasi-organisasi sayap utama PDI Perjuangan:

1. Banteng Muda Indonesia (BMI)

Banteng Muda Indonesia (BMI) merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan yang dibentuk pada 29 Maret 2000 di Semarang, Jawa Tengah. BMI merupakan

organisasi kemasyarakatan berbasis kaum muda yang memiliki wawasan nasionalis kebangsaan (Mahendra, 2024). Organisasi ini menjadi wadah bagi kader muda partai untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan militansi terhadap ideologi Marhaenisme. BMI memiliki peran strategis dalam melakukan rekrutmen kader muda dan menjaga semangat juang sesuai pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Fajri, 2025).

2. Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI)

Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) adalah organisasi sayap PDI Perjuangan yang didirikan melalui deklarasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 29 Maret 2007 di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ide awal pembentukan BAMUSI diprakarsai oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan, Taufik Kemas. Deklarasi pembentukan BAMUSI dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin (Mahendra, 2024). BAMUSI berfungsi sebagai jembatan yang membentuk *political linkage* antara PDI Perjuangan dengan masyarakat Islam, dan berperan sebagai "mesin politik" untuk memperoleh dukungan dari pemilih muslim (Amimi, 2025).

3. Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM)

Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan yang didirikan pada 3 Desember 2004. REPDEM dideklarasikan oleh 52 aktivis berdasarkan kebersamaan dalam cita-cita membangun dan membesarkan PDI Perjuangan, salah satunya adalah Budiman Sudjatmiko. Organisasi ini menjadi wadah bagi kader muda partai untuk menyalurkan aspirasi dan intelektualitas pemuda (Mahendra, 2024).

4. Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI)

Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan yang berfokus pada bidang agraria. GANTI dideklarasikan di Pelabuhan Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara pada tahun 2013 dengan Rokhmin Dahuri sebagai Ketua Dewan Pembina. Organisasi ini menjadi wadah perjuangan bagi petani dan nelayan sebagai representasi dari wong cilik yang menjadi basis ideologi Marhaenisme (Mahendra, 2024)

5. Taruna Merah Putih

Taruna Merah Putih (TMP) merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan yang didirikan pada 10 Januari 2008, bertepatan dengan HUT Partai PDI Perjuangan, dan dideklarasikan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. TMP menjadi wadah sekaligus motor penggerak generasi milenial dan Generasi Z dalam memperkuat dukungan terhadap PDI Perjuangan (Mahendra, 2024). TMP menggunakan strategi khusus untuk menarik dukungan dari kaum muda melalui kerja-kerja non-partai yang lebih fleksibel, menjadikannya "etalase" untuk menunjukkan tampilan lain dari partai politik yang selama ini terkesan kaku dan membosankan (Adi & Kurniadi, 2021). Organisasi ini memiliki konsolidasi di 34 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia (Lesmana, 2025)

6. Komunitas Juang

Komunitas Juang merupakan organisasi sayap partai PDI Perjuangan di Jawa Tengah yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah sejak tahun 2013. Organisasi ini bertugas melaksanakan fungsi perekrutan dan

pendidikan kader secara sistematis dengan kurikulum, struktur organisasi, tahapan rekrutmen, serta pelatihan yang berjenjang (Miftahussurur, 2025)

Selain organisasi sayap, PDI Perjuangan juga memiliki departemen khusus yang menangani pemberdayaan perempuan, yaitu Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan yang berada di bawah struktur kepengurusan DPP dan DPD partai. Departemen ini berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan program-program kaderisasi perempuan, pendidikan politik berbasis gender, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan (DPD PID Perjuangan Jawa Tengah, 2026).

Sistem kaderisasi ini terus diperkuat hingga tahun 2025, dengan penyelenggaraan rutin seperti Pendidikan Kader Pratama dan program sektoral, menunjukkan komitmen PDI Perjuangan dalam membangun kader yang ideologis, disiplin, dan berpihak pada rakyat (Prasetyo, 2025). Melalui organisasi-organisasi sayap ini, PDI Perjuangan tidak hanya memperluas basis massa, tetapi juga memastikan regenerasi kader yang memiliki pemahaman ideologis yang kuat dan komitmen terhadap perjuangan kerakyatan sesuai dengan nilai-nilai Marhaenisme.

2.4 Kaderisasi Perempuan di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

DPC PDI Perjuangan Kota Semarang memiliki kader perempuan yang terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi dan politik partai. Keterlibatan tersebut berlangsung melalui beberapa ruang organisasi, mulai dari keanggotaan partai, organisasi sayap, kepengurusan di tingkat kecamatan, hingga kepengurusan pada tingkat kota. Selain menjalankan aktivitas organisasi, sejumlah kader perempuan juga memiliki pengalaman dalam jabatan publik, termasuk sebagai anggota DPRD

Kota Semarang. Keberadaan kader perempuan dengan latar belakang organisasi yang beragam menjadi bagian dari pelaksanaan kaderisasi di lingkungan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.

Salah satu pengalaman kader perempuan dapat dilihat dari perjalanan organisasi Trifena Weyatin Soehendro. Trifena merupakan kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Semarang dari Daerah Pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Semarang Timur. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, keterlibatannya dalam PDI Perjuangan berlangsung secara bertahap. Ia terlebih dahulu terlibat sebagai simpatisan, kemudian aktif dalam kegiatan organisasi yang berkaitan dengan partai, sebelum memperoleh pengalaman dalam kepengurusan di tingkat kecamatan. Pengalaman tersebut memperlihatkan adanya proses keterlibatan kader perempuan melalui aktivitas organisasi sebelum memasuki struktur kepengurusan partai.

Perjalanan Trifena juga menunjukkan bahwa pengalaman organisasi menjadi salah satu bagian yang dapat menyertai proses perkembangan seorang kader. Keterlibatan dalam kegiatan partai dan organisasi di tingkat bawah memberikan kesempatan bagi kader untuk memperoleh pengalaman organisasi sebelum mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Namun, pengalaman tersebut merupakan pengalaman individual dan belum dapat menggambarkan keseluruhan proses kaderisasi perempuan di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Proses kaderisasi perlu dilihat dari pengalaman kader lain serta dari mekanisme yang ditetapkan dan dijalankan oleh organisasi.

Selain Trifena, terdapat kader perempuan lain yang memiliki pengalaman dalam organisasi dan jabatan legislatif, antara lain Hanik Khoiru Solikah dan Lely Purwandari. Hanik merupakan anggota DPRD Kota Semarang dari Daerah Pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Gayamsari, Genuk, dan Pedurungan, sedangkan Lely Purwandari merupakan anggota DPRD Kota Semarang dari Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Tembalang dan Candisari. Keberadaan beberapa kader perempuan tersebut memperlihatkan bahwa kader perempuan PDI Perjuangan Kota Semarang memiliki pengalaman organisasi dan politik yang beragam.

Keragaman pengalaman tersebut menjadi alasan penting untuk melihat proses pengembangan kapasitas kader perempuan tidak hanya dari keberadaan mereka yang telah memperoleh posisi tertentu, tetapi juga dari tahapan yang mereka lalui selama menjadi kader. Penelitian ini memusatkan perhatian pada proses pengembangan kapasitas kader perempuan di lingkungan DPC, yang mencakup bentuk pembelajaran yang tersedia, materi dan substansi pembinaan, proses dan metode yang digunakan, pengalaman kader dalam menjalani proses tersebut, serta kapasitas yang berkembang darinya. Pengalaman kader yang telah maupun sedang mengikuti proses tersebut digunakan untuk memahami bagaimana pengembangan kapasitas kader perempuan berlangsung di tingkat DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.

**Tabel 2 2 Pemetaan Kegiatan yang Mendukung Pengembangan Kapasitas
Kader Perempuan di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2019–
2026**

No.	Tahun	Kegiatan	Penyelenggara/ Tingkat	Bentuk Dukungan terhadap Pengembangan Kapasitas Kader Perempuan	Dimensi	Gambar
1	2021	Pendidikan Politik dan Pembekalan Kader Perempuan, 17 Oktober 2021	DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah	Memberikan pendidikan politik dan pembekalan khusus perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi politik kader perempuan	<i>Personnel Training and Development</i>	Gambar 3.6
2	2022	Lomba Senam SICITA di 38 titik lokasi Kota Semarang	DPC PDI Perjuangan Kota Semarang	Menjadi ruang konsolidasi, keterlibatan kader perempuan, serta membangun jejaring dan kedekatan dengan masyarakat	<i>Organization Development</i>	Gambar 3.2
3	2022	Pendidikan kader perempuan, 10–12 Juni 2022	DPP PDI Perjuangan	Memberikan pendidikan khusus perempuan dengan materi ideologi, kepemimpinan,	<i>Personnel Training and Development</i>	Gambar 3.7

No.	Tahun	Kegiatan	Penyelenggara/ Tingkat	Bentuk Dukungan terhadap Pengembangan Kapasitas Kader Perempuan	Dimensi	Gambar
				gender, komunikasi publik, dan tantangan politik perempuan		
4	2023	Pendidikan kader perempuan untuk persiapan perempuan menjadi pemimpin, 23–26 Februari 2023	DPP PDI Perjuangan	Mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kesiapan kader perempuan untuk menjalankan peran politik	<i>Personnel Training and Development</i>	Gambar 3.8
5	2024	Kunjungan kader perempuan kepada veteran perempuan pejuang di Semarang, 22 Desember 2024	PDI Perjuangan	Menjadi ruang pembelajaran nonformal mengenai nilai perjuangan, keteladanan, sejarah, dan identitas politik perempuan	<i>Personnel Training and Development</i>	Gambar 3.11

No.	Tahun	Kegiatan	Penyelenggara/ Tingkat	Bentuk Dukungan terhadap Pengembangan Kapasitas Kader Perempuan	Dimensi	Gambar
6	2026	Konsolidasi PAC se-Kota Semarang, 11 Juni 2026	DPC PDI Perjuangan Kota Semarang	Memperkuat koordinasi organisasi dan kapasitas kader pada struktur partai tingkat kecamatan	Organization Development	Gambar 3.3
7	2026	Rakor Pelaksanaan Musran dan Anak Ranting	DPC PDI Perjuangan Kota Semarang	Memberikan pengalaman organisatoris melalui koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pada struktur partai tingkat bawah	Organization Development	Gambar 3.4
8	2026	Pelatihan Admin Cyber	DPC PDI Perjuangan Kota Semarang	Mengembangkan keterampilan teknis kader dalam pengelolaan administrasi dan sistem informasi organisasi	Organization Development	Gambar 3.5
9	2026	Seleksi Training of Trainer Perempuan	DPC PDI Perjuangan Kota Semarang	Membuka ruang pengembangan kapasitas perempuan sebagai penggerak	Personnel Training and Development	Gambar 3.9

No.	Tahun	Kegiatan	Penyelenggara/ Tingkat	Bentuk Dukungan terhadap Pengembangan Kapasitas Kader Perempuan	Dimensi	Gambar
		Penggerak Akar Rumput se-Kota Semarang		di tingkat akar rumput, termasuk kemampuan menjadi fasilitator pendidikan politik		
10	2026	Dialog Perempuan	DPC PDI Perjuangan Kota Semarang	Menjadi ruang penguatan wawasan, kepemimpinan, pemberdayaan, dan partisipasi perempuan melalui dialog dengan tokoh dan perempuan inspiratif	<i>Personnel Training and Development</i>	Gambar 3.10

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan dokumen organisasi, dokumentasi kegiatan, wawancara informan, dan sumber publik yang dapat diverifikasi.

Pemetaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas kader perempuan di lingkungan PDI Perjuangan Kota Semarang berlangsung melalui bentuk kegiatan yang beragam dan tidak seluruhnya diselenggarakan secara mandiri oleh DPC. Sebagian proses pengembangan berlangsung melalui kaderisasi umum yang dapat diikuti oleh kader laki-laki dan perempuan, sementara kegiatan

lain secara khusus ditujukan kepada perempuan. Pada beberapa periode, kader perempuan memperoleh kesempatan pengembangan melalui program yang diselenggarakan oleh struktur partai di tingkat DPD maupun DPP. Sementara itu, pada tahun 2026 mulai terlihat kegiatan yang secara langsung diselenggarakan oleh DPC Kota Semarang dan secara eksplisit menasar perempuan, seperti *Training of Trainer* Perempuan Penggerak Akar Rumput dan Dialog Perempuan Masa Depan Indonesia. Pemetaan tersebut memberikan gambaran awal mengenai bentuk dan jalur pengembangan kapasitas yang tersedia bagi kader perempuan, sedangkan pembahasan mengenai bagaimana kegiatan tersebut diakses, dilaksanakan, dan dirasakan oleh kader dianalisis lebih lanjut pada Bab III.